



# Islamic Education Management Model in Madrasah

Rika Fitri<sup>1</sup>, Ertati<sup>2</sup>, Syofya Yetni<sup>3</sup>, Syofia Riantito<sup>3</sup>

<sup>1</sup>STAI Balaiselasa YPPTI Pesisir Selatan Sumatera Barat, Indonesia

<sup>2</sup>Guru Madrasah Aliyah Negeri 3 Pesisir Selatan Sumatera Barat, Indonesia

<sup>3</sup>Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 11 Pesisir Selatan Sumatera Barat, Indonesia

✉ [rikafitrisyah@gmail.com](mailto:rikafitrisyah@gmail.com) \*

## Article Information:

Received August 4, 2023

Revised September 6, 2023

Accepted October 8, 2023

**Keywords:** *Management, Islamic education, madrasah*

## Abstract

Managing Islamic education in madrasah and the role of the Education Council and School Committee in improving the quality of Islamic education are things that must be considered. This research aims to analyze the management model of Islamic education in madrasah. This research uses a qualitative type with descriptive methods. The research carried out was field research by collecting data using observation, interviews and documentation. The results of the research found the importance of community empowerment in Islamic education, namely to increase the role of the community in planning, implementing and evaluating the provision of education, stimulating changes in attitudes and perceptions of the community towards a sense of partnership and tolerance, supporting the community to take a clear role in education, encouraging the community to develop innovation. The strategy for Islamic education in facing change is to adapt to environmental changes, monitor the educational environment and influence the environment. Encourage the participation of parents and the community in managing Islamic education, namely arousing attention to the role of the education council and school committee in improving the quality of Islamic education, namely in determining the vision, mission, strategy, goals, logo, song and school rules and carrying out other educational technical matters.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan pendidikan Islam selama ini telah diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Pada tahap pelaksanaan, pendidikan Islam tidak terlepas dari manajemen dan lingkungan disekitarnya, karena manajemen memerlukan strategi yang tepat, dan tim yang solid sehingga tujuan bisa tercapai dengan baik (Arisanti, 2016). Manajemen dan lingkungan pendidikan memiliki interaksi dan pengaruh yang kuat terhadap proses dalam pengelolaan pendidikan termasuk pendidikan Islam. Dengan adanya interaksi serta dukungan dari masyarakat sekitarnya terhadap lembaga pendidikan, maka pendidikan Islam akan semakin maju dan berkembang. Dengan kata lain, kerjasama yang baik dari guru, orang tua, dewan pendidikan, komite dan masyarakat disekitar lingkungan pendidikan, senantiasa akan dapat mengembangkan potensi pendidikan

## How to cite:

Fitri, R., Ertati, E., Yetni, S., Riantito, S. (2023). Islamic Education Management Model in Madrasah. *Al-Ashri: Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 50-59.

## E-ISSN:

xxxx xxxx

## Published by:

LP2M STAI Balaiselasa YPPTI Pesisir Selatan Sumatera Barat

Islam itu sendiri (Yulianti et al., 2018). Lembaga pendidikan Islam sebagai organisasi, memang membutuhkan interaksi yang baik dengan lingkungan. Karena keterlibatan lingkungan berpengaruh kuat terhadap kualitasnya (Bafadhol, 2017). Lingkungan adalah kekuatan-kekuatan yang berbeda di luar organisasi yang secara potensial baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi terhadap kinerja organisasi tersebut. Di samping meningkatkan interaksi dengan lingkungan, lembaga pendidikan Islam juga diharapkan dapat berperan secara efektif baik dalam kepemimpinan, kurikulum, proses pembelajaran, komunikasi, dan sebagainya (Asril et al., 2023). Hal ini sejalan dengan ungkapan, bahwa lembaga-lembaga pendidikan diharapkan mampu mewujudkan peranannya secara efektif dengan keunggulan dalam kepemimpinan, staf, proses belajar mengajar, pengembangan staf, kurikulum, tujuan dan harapan, iklim sekolah, penilaian diri, komunikasi dan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Untuk membuat semua pihak terlibat, dan merasa memiliki terhadap lembaga pendidikan Islam itu, dibutuhkan suasana yang demokratis, dan semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dari sinilah lalu muncul ide untuk mendesain sebuah pendidikan yang berbasis masyarakat (*community-based education*) (Alamin, 2020).

Desain dasar pendidikan Islam berbasis masyarakat adalah penguatan sistem pendidikan di masyarakat dengan serangkaian agenda, yaitu: pertama, memobilisasi sumber daya setempat dan dari luar guna meningkatkan peran masyarakat dalam hal perencanaan, implementasi, evaluasi penyelenggaraan pendidikan disemua jalur, jenjang, jenis dan satuan pendidikan (Masduqi, 2021). Kedua, menstimulasi perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rasa kemitraan, toleransi dan kesediaan menerima keragaman sosial budaya. Ketiga, mendukung masyarakat untuk mengambil peran yang jelas dalam pendidikan terutama orang tua dalam paket kebijakan desentralisasi. Keempat, mendorong peran masyarakat dalam mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, mempertegas peran sekolah, meningkatkan mutu relevansi, efisiensi manajemen pendidikan, dan membuka kesempatan sekolah yang lebih besar demi program belajar 9 tahun pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Sabri, 2012; Rahmiati et al., 2023)

Sehubungan dengan pembahasan ini, menurut pengamatan penulis, lembaga pendidikan Islam saat ini banyak menghadapi tantangan, baik dari segi organisasi maupun pengorganisasiannya, terutama sekali sehubungan dengan manajemen dan lingkungan pendidikan Islam itu sendiri (Darim, 2020; Iskandar et al., 2023). Tantangan ini apakah disebabkan oleh melemahnya manajemen pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan Islam atau strategi yang dipakai untuk menghadapi perubahan belum mapan. Selanjutnya yang penulis pertanyakan, bagaimana menggalang partisipasi orang dan masyarakat dalam mengelola pendidikan Islam, dan bagaimana peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. Dalam (Hasneli, 2015), menjelaskan bahwa manajemen merupakan penyusunan perencanaan, menggerakkan kegiatan dan pencapaian hasil yang diinginkan melalui pelibatan dan pemanfaatan sumber daya manusia.

## METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan *library research* untuk mencapai fakta dan realitas yang ada, khususnya perkembangan pada dunia pendidikan Islam. Sumber data yang di himpun dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder. Data primer penelitian ini adalah buku Manajemen Pendidikan Islam. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan Islam, serta informasi yang relevan. Metode pengumpulan data, yaitu melalui observasi dan studi dokumentasi. Setelah data yang dibutuhkan di peroleh, maka langkah-langkah yang penulis tempuh dalam analisis data adalah reduksi data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pembahasan.

Maksudnya proses pengolahan data mulai dari editing, koding, hingga memperoleh kesimpulan data. *Display data*, yaitu menyajikan data dalam bentuk kelompok, organisasi atau bentuk penyajian lainnya. Pengambilan kesimpulan, atau yang telah diperoleh di carikan hubungannya dengan rumusan masalah, sehingga penulis dapat memperoleh kesimpulan (Aziz et al., 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan Islam

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya peningkatan kualitas hidup sekelompok masyarakat kearah yang lebih baik (Endah, 2020). Oleh karena itu makna pemberdayaan masyarakat memiliki cakupan yang luas, namun dalam hal ini difokuskan pada aspek pendidikan terutama Pendidikan Islam. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dari fungsi pelaksanaan manajemen pendidikan Islam. Dikatakan demikian, karena arti manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah; i) penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, ii) pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi (Depdiknas, 2005).

Sejalan dengan ungkapan Johnson dalam Pirdata tahun 2004 manajemen adalah proses pengintegrasian sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Maksud sumber disini ialah mencakup orang-orang, alat-lat, media, bahan-bahan, uang dan sarana. Semuanya diarahkan dan dikoordinasi agar terpusat dalam rangka menyelesaikan. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa manajemen adalah aktifitas aktif untuk pencapaian sesuatu yang diinginkan melalui pemamfaatan segala sumber daya manusia, termasuk kegiatan menggunakan tenaga orang lain (Nindatu, 2019). Bila dihubungkan dengan pendidikan Islam, maka pemahaman manajemen disini adalah manajemen yang diterapkan untuk pengembangan pendidikan Islam. Menurut Hartanti, (2020) manajemen pendidikan Islam merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.

Sedangkan lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi disekeliling proses pendidikan, yang terdiri dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati. Keempat kelompok benda-benda lingkungan pendidikan itu ikut berperan dalam rangka usaha setiap siswa atau mahasiswa mengembangkan dirinya. Institusi pendidikan yang banyak menggunakan masyarakat sebagai sumber pelajaran memberikan kesempatan yang luas untuk mengenal kehidupan masyarakat yang sebenarnya (Ridwan, 2019).

Tetapi manajemen pendidikan menaruh perhatiannya terutama kepada lingkungan yang berwujud manusia yaitu masyarakat (Ridwan et al., 2023). Tugas manajemen pendidikan antara lain mengintegrasikan dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber-sumber pendidikan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Para guru diharapkan dapat mempergunakan dan memanfaatkan sumber-sumber pendidikan tersebut dalam rangka meningkatkan proses belajar-mengajar pada masing-masing sekolah atau lembaga pendidikan dimana mereka bertugas. Dalam hal ini manajer hanya memberikan rambu-rambu atau petunjuk-petunjuk umum dalam penggunaan lingkungan yang dimaksud (Hefniy et al., 2022).

Bila diperhatikan lingkungan pendidikan pada saat ini, terlihat kekuasaan birokrasi telah menjadi penyebab turunnya semangat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Hal ini terjadi sejak pemerintah mengambil alih kepemilikan lembaga pendidikan, yang dikelola sepenuhnya secara birokratik bahkan sentralistik. Sejak itu rasa memiliki masyarakat terhadap lembaga pendidikan semakin berkurang. Peran masyarakat yang sebelumnya “bertanggung jawab” berubah menjadi “berpartisipasi”, sehingga lembaga pendidikan dianggap asing dan tamu dirumah sendiri (Sholeh, 2009).

Sholeh, (2016) menjelaskan bahwa untuk membuat semua pihak terlibat dan merasa memiliki terhadap sekolah dibutuhkan suasana yang demokratis, dan semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dari sinilah lalu muncul ide untuk mendesain sebuah pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*). Plat form dasar pendidikan berbasis masyarakat adalah penguatan sistem pendidikan di masyarakat dengan serangkaian agenda, yaitu; pertama, memobilisasi sumber daya setempat dan dari luar guna meningkatkan peran masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam perencanaan, implementasi, evaluasi penyelenggaraan pendidikan disemua jalur, jenjang, jenis dan satuan pendidikan. Kedua, menstimulasi perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rasa kemitraan, toleransi dan kesediaan menerima keragaman sosial budaya. Ketiga, mendukung masyarakat untuk mengambil peran yang jelas dalam pendidikan terutama orang tua dalam paket kebijakan desentralisasi. Keempat, mendorong peran masyarakat dalam mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, mempertegas peran sekolah, meningkatkan mutu relevansi, efisiensi manajemen pendidikan, dan membuka kesempatan sekolah yang lebih besar demi program belajar 9 tahun pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

### **Strategi Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Perubahan**

Strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan sebagaimana pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut; melakukan penyesuaian terhadap lingkungan, yaitu penyesuaian struktur dan desain organisasi. Melakukan pemantauan terhadap lingkungan, secara tidak langsung melalui informasi dari berbagai media. Manajer berusaha untuk mempengaruhi lingkungan secara langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan lobi-lobi pemasangan iklan, dan mengadakan kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya manajer tidak hanya bekerja dalam pemasangan iklan, dan mengadakan kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkait lingkungan internal dan eksternal domestik saja, akan tetapi juga harus memperhatikan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi organisasi. Untuk dapat memenangkan kompetisi dalam era globalisasi ini maka manajer harus memahami unsur-unsur pokok yang berkaitan dengan lingkungan yaitu; strategi struktur dan persaingan. Kondisi permintaan terhadap produk yang dihasilkan, untuk itu perlu diusahakan produk yang bermutu tinggi dan bersifat inovatif (Tampubolon, 2020).

Kondisi pekerja, infrastruktur ekonomi, raw input, dan sumber daya alam. Kemampuan menyediakan sumber daya input dan jasa yang diperlukan untuk mendukung produksi yang dihasilkan. Organisasi pendidikan sebagai suatu system terbuka. Selalu mengadakan kontak atau hubungan dengan lingkungannya. Lingkungan semacam ini disebut dengan supra system. Organisasi pendidikan sebagai system terbuka, memiliki apa yang disebut dengan “negentropy”, yaitu suatu usaha yang terus menerus untuk menghalangi terjadinya “entropy”. Hal ini menunjukkan bahwa hidup atau matinya lembaga pendidikan sebagian besar dilakukan oleh usaha lembaga pendidikan itu sendiri dalam membenahi dirinya (Munthe et al., 2021).

Konsep “negentropy” dapat digunakan dalam mengelola pendidikan. Lembaga pendidikan yang tidak mempunyai keunggulan dan tidak mempunyai nama baik, dan tidak mempunyai hubungan baik dengan pendukungnya, tidak akan diminati oleh masyarakat atau pendukungnya. Oleh sebab itu lembaga pendidikan harus membuka diri dan mengadakan hubungan dengan pihak lain yaitu dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Hubungan pendidikan bukanlah berdiri sendiri dalam membina pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan dimaksud, akan tetapi tidak dipisahkan dengan masyarakat luas.

## **Menggalang Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat dalam Mengelola Pendidikan Islam**

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, manajer pendidikan harus dapat menggugah perhatian tokoh masyarakat, terutama membicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendidikan. Agar sekolah memberikan citra positif kepada masyarakat, maka pihak lembaga pendidikan tidak hanya menyediakan informasi kepada masyarakat, tetapi masyarakat memerlukan bukti nyata tentang apa yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dan kemajuan peserta didik. Kalau sekiranya bukti ini telah dapat diperlihatkan kepada masyarakat, maka masyarakat akan memberi dukungan dan sumbangan yang lebih besar kepada lembaga pendidikan tersebut.

Pemberdayaan potensi masyarakat harus selalu diarahkan kepada perkembangan kreativitas masyarakat. Agar maksud ini bisa dicapai, maka kemampuan keterampilan dan seni harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan (Soetari, 2017). Bukti tersebut dapat berupa keberhasilan lembaga pendidikan dalam mengikuti cerdas cermat pada acara-acara televisi, piagam-piagam keberhasilan siswa mengikuti lomba seperti dalam cabang olahraga, lomba keterampilan, pidato adat dan bahasa asing serta lomba lainnya. Selanjutnya bukti keberhasilan berupa keberhasilan para lulusan untuk mengikuti persaingan ke sekolah yang lebih tinggi. Semakin besar kepuasan yang diterima oleh masyarakat, akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap lembaga pendidikan tersebut. Sumbangan itu baik berupa materil maupun non-material. Beberapa Negara yang telah menerapkan sistem pengelolaan pendidikan secara desentralisasi, menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Partisipasi tersebut terlihat dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang dimaksud (Maujud, 2018).

Masyarakat akan menyadari betapa pentingnya lembaga pendidikan untuk memajukan putra-putri mereka dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang keterampilan yang siap pakai dalam usaha melaksanakan pembangunan masyarakat. Apakah yang dapat di perbuat parasiswa atau mahasiswa sebagai generasi penerus untuk terwujudnya masyarakat madani, yakni masyarakat yang memiliki pribadi-pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia yang dapat berdiri sendiri dan dapat bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan memiliki sikap amanah (Muljawan, 2020).

Yakin, (2016) mengemukakan beberapa contoh partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan yaitu dengan munculnya beberapa wadah seperti: i) dewan pendidikan, ii) komite sekolah, iii) persatuan orang tua siswa, iv) perkumpulan olah raga, v) perkumpulan kesenian, vi) organisasi-organisasi lainnya. Partisipasi masyarakat tersebut juga terlihat dalam bidang kurikulum, alat pelajaran, bantuan dana, material, bangunan, kontrol terhadap kegiatan sekolah dan sebagainya. Selain itu, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat berupa; i) ikut sertanya dalam pertemuan yang diadakan sekolah atau lembaga pendidikan, ii) datang berkunjung ke sekolah untuk mengamati dan mengetahui keadaan sekolah, iii) melalui surat-surat, iv) melalui telepon, v) ikut dalam kegiatan kesenian yang dilakukan sekolah, vi) ikut dalam kegiatan bazaar yang dilakukan sekolah, dan vii) terlibat dalam kegiatan- kegiatan lainnya yang dilakukan sekolah.

Keterlibatan masyarakat di perguruan tinggi yaitu adanya dewan penyantun, yayasan perguruan tinggi, dan lain-lain. Dewan penyantun tersebut meliputi badan-badan yang dibentuk oleh perguruan tinggi dan bisanya mendapat legalitas dari senat perguruan tinggi (Wahyudi, 2015). Anggota-anggota dewan penyantun tersebut berasal dari tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh di bidang sosial kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang perusahaan dan bidang lainnya yang dapat memberikan sumbangan kepada perguruan tinggi tersebut, dalam usaha meningkatkan lulusan

yang berkualitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan adalah keikutsertaan masyarakat dalam memberikan gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan (Imron, 2008).

Biasanya dewan penyantun tersebut bertugas sebagai penyambung perguruan tinggi dengan masyarakat. Pihak perguruan tinggi dalam hal ini manajer dan anggota dewan penyantun membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perguruan tinggi tersebut. Setelah itu dewan penyantun merealisasikannya ke tengah-tengah masyarakat. Di samping itu yayasan pendidikan juga berusaha untuk membantu sekolah. Pihak manajer bersama-sama dengan pihak yayasan menangani pendidikan secara keseluruhan. Manajer lebih banyak bergerak dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari, dan yayasan yang lebih banyak menangani kebijakan dan strategi pendidikan, terutama sekali yang berkaitan dengan dana yang ditujukan agar lembaga pendidikan tersebut tetap berjalan dengan baik (Hakim, 2016).

### **Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam**

Peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tidak dapat dipisahkan dari aspek pelaksanaan manajemen pendidikan di tingkat sekolah (Heryanto, 2013). Beberapa aspek manajemen yang secara langsung dapat diserahkan sebagai urusan yang menjadi kewenangan tingkat sekolah adalah sebagai berikut: pertama, menetapkan visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu dan tata tertib sekolah. Urusan ini amat penting sebagai modal dasar yang harus dimiliki sekolah. Setiap sekolah seyogianya telah dapat menyusun dan menetapkan sendiri visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib sekolah. Ini merupakan bukti kemandirian awal yang harus ditunjukkan oleh sekolah. Jika masa lalu sekolah lebih dipandang sebagai lembaga birokrasi yang selalu menunggu perintah dan petunjuk dari atas, dalam era otonomi daerah ini sekolah harus telah memiliki kesadaran untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Dalam hal ini, sekolah harus menjalin kerja sama sebaik mungkin dengan orang tua dan masyarakat sebagai mitra kerjanya. Bahkan, dalam menyusun program kerjanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi, misi strategi, dan tujuan sekolah tersebut, orang tua dan masyarakat yang tergabung dalam Komite Sekolah, serta seluruh warga sekolah harus dilibatkan secara aktif dalam menyusun program kerja sekolah, dan sekaligus lengkap dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Kedua, memiliki kewenangan dalam penerimaan siswa baru sesuai dengan ruang kelas yang tersedia, fasilitas yang ada, jumlah guru, dan tenaga administratif yang dimiliki. Berdasarkan sumber daya pendukung yang dimilikinya, sekolah secara bertanggung jawab harus dapat menentukan sendiri jumlah siswa yang akan diterima, syarat siswa yang akan diterima, dan persyaratan lain yang terkait. Beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten atau kota tentu saja perlu mendapatkan pertimbangan secara bijak.

Ketiga, menetapkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang akan diadakan dan dilaksanakan oleh sekolah. Dalam hal ini, dengan mempertimbangkan kepentingan daerah dan masa depan lulusannya, sekolah perlu diberikan kewenangan untuk melaksanakan kurikulum nasional dengan kemungkinan menambah atau mengurangi muatan kurikulum dengan meminta pertimbangan kepada Komite Sekolah. Kurikulum muatan lokal, misalnya dalam mengambil kebijakan untuk menambah mata pelajaran seperti bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, komputer, dan sebagainya. Kebijakan tersebut setelah meminta pertimbangan dari Komite Sekolah, termasuk risiko anggaran yang diperlukannya. Dalam kaitannya dengan penetapan kegiatan ekstrakurikuler, sekolah juga harus meminta pendapat siswa dalam menentukan kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah. Oleh karena itu, sekolah dapat melakukan pengelolaan biaya operasional sekolah, baik yang

bersumber dari pemerintah kabupaten atau kota maupun dari masyarakat secara mandiri.

Keempat, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk buku pembelajaran dapat diberikan kepada sekolah, dengan memerhatikan standar dan ketentuan yang ada. Misalnya, buku murid tidak seenaknya diganti setiap tahun oleh sekolah, atau buku murid yang akan dibeli oleh sekolah adalah yang telah lulus penilaian. Pemilihan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dapat dilaksanakan oleh sekolah, dengan tetap mengacu pada standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau provinsi dan kabupaten atau kota.

Kelima, penghapusan barang dan jasa dapat dilaksanakan sendiri oleh sekolah, dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Hal yang biasa terjadi, karena kewenangan penghapusan itu tidak jelas, barang dan jasa yang ada di sekolah tidak pernah dihapuskan, meskipun ternyata barang dan jasa sama sekali telah tidak berfungsi atau malah telah tidak ada barangnya.

Keenam, proses pengajaran dan pembelajaran. ini merupakan kewenangan profesional sejati yang dimiliki oleh lembaga pendidikan sekolah. Kepala sekolah dengan guru secara bersama-sama merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan lancar dan berhasil. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan direkomendasikan sebagai model pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Pada masa sentralisasi pendidikan, proses pembelajaran pun diatur secara rinci dalam kurikulum nasional. Dalam era otonomi daerah, kurikulum nasional menjadi kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Dan selanjutnya berkembang menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan Kurikulum Tahun 2013 (K.13).

Ketujuh, urusan teknis edukatif yang lain sejalan dengan konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) merupakan urusan yang sejak awal harus menjadi tanggung jawab dan kewenangan setiap satuan pendidikan. Pemberdayaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan Desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah merupakan satu bentuk desentralisasi yang langsung sampai ke ujung tombak pendidikan di lapangan. Jika kantor cabang dinas pendidikan kecamatan dan dinas pendidikan kabupaten/kota lebih memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pembinaan, pengarahannya, pemantauan, dan penilaian maka sekolah seharusnya diberikan peran nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Hal ini disebabkan proses interaksi edukatif di sekolah merupakan inti dari proses pendidikan yang sebenarnya

Pemberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerja sama dengan orang tua, dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama. Kemudian, prinsip kemandirian dalam MBS adalah kemandirian dalam nuansa kebersamaan. Hal ini merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip yang disebut sebagai total *quality management*, melalui suatu mekanisme yang dikenal dengan konsepsi total *football* dengan menekankan pada mobilisasi kekuatan secara sinergis yang mengarah pada satu tujuan, yaitu peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan dengan pengembangan masyarakat. Sekolah dan orang tua secara bersama-sama berusaha untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar susila dan norma-norma agama (Megiati, 2016).

Di samping uraian di atas, peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam terlihat pada penyusunan rencana dan program, RAPBS, pelaksanaan program pendidikan, dan akuntabilitas pendidikan

adalah; Pertama; Penyusunan Rencana dan Program. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berfungsi sebagai pendamping bahkan penyeimbang bagi sekolah. Oleh karena itu setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kemudian dalam menyusun program pendidikan *life skill*, komite dapat membantu sekolah mengumpulkan fakta-fakta mengenai kebutuhan serta potensi sumber daya yang tersedia di dalam masyarakat.

Kedua; Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah. Seluruh jenis sumber pendapatan baik dari pemerintah maupun sumber lainnya secara resmi harus diketahui bersama oleh pihak sekolah dan komite. Begitu juga belanja yang harus dikeluarkan oleh sekolah. Karena kedua sisi anggaran ini dituangkan dalam suatu neraca tahunan sekolah yang disebut dengan RAPBS. Rencana ini disahkan atas persetujuan bersama antara pihak sekolah dengan Komite Sekolah. Mekanisme ini dilakukan adalah untuk memperkecil penyalahgunaan, baik dalam pendapatan maupun dalam pengeluaran sekolah, sehingga anggaran resmi pendidikan di sekolah semakin bertambah dan pelayanannya semakin efisien.

Ketiga; Pelaksanaan Program Pendidikan. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berfungsi sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah. Disini komite menjadi partner bagi sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana pendidikan, dan juga harus meneliti kemungkinan-kemungkinan untuk pengembangan proses pembelajaran kearah yang berkualitas. Keempat; Akuntabilitas Pendidikan. Di sisi ini, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berfungsi untuk meminta pertanggungjawaban atas hasil pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah. Lebih dari itu, mereka juga dapat melakukan protes terhadap lembaga atau dinas terkait, dan menyampaikan rasa puas atau ketidakpuasan atas nama masyarakat tentang lingkungan pendidikan itu sendiri (Bisri, 2020).

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka penulis mendapatkan hasil bahwa ada beberapa hal sebagai Model Pengelolaan Pendidikan Islam di Madrasah sebagai berikut: pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan Islam karena; menstimulasi perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rasa kemitraan dan toleransi, mendukung masyarakat mengambil peran yang jelas dalam pendidikan, mendorong masyarakat dalam mengembangkan inovasi. Strategi pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan, menggalang partisipasi orang tua dan masyarakat dalam mengelola pendidikan Islam. Peran dewan pendidikan dan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam seperti penyusunan rencana dan program, RAPBS, pelaksanaan program, dan akuntabilitas pendidikan.

## REFERENSI

- Alamin, N. S. (2020). Implementasi Pendidikan Kepemimpinan di Pesantren (Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor Indonesia). *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 33–48. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.5.1.33-48>
- Arisanti, D. (2016). Manajemen Lingkungan Pendidikan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 1(1), 71–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/althariqah>.
- Asril, Z., Engkizar, E., Syafril, S., Arifin, Z., & Munawir, K. (2023). Perspective Chapter: A Phenomenological Study of an International Class Program at an Indonesian University. In *Higher Education-Reflections from the Field*, 3. <https://doi.org/10.5772/intechopen.110325>
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyantri, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192–201.

- <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575>
- Bafadhol, I. (2017). Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Edukasi Islami* *Jurnal Pendidikan Islam*, 06(11). <https://doi.org/http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/ei/article/view/95>
- Bisri, A. M. (2020). Studi Analisis Komite Sekolah/Madrasah Dalam Mengawal Kualitas Pendidikan. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 51–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.31>
- Darim, A. (2020). Manajemen perilaku organisasi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 22–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/1129>
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143. <https://doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3319>
- Hakim, M. N. (2016). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Mewujudkan Sekolah Islam Unggulan. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 104–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/ndh.v1i2.7>
- Hartanti, N. B. (2020). Pelatihan Kewirausahaan dalam Mengolah Rumput Laut menjadi Manisan dan Dodol pada Kelompok Belajar Sipatuo di LKP BBEC Bontang. *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 23–27. <https://doi.org/10.30872/lis.v1i2.431>
- Hasneli, H. (2015). Manajemen Dan Lingkungan Pendidikan Islam. *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam*, 6(2), 109–122. <https://doi.org/10.15548/alqalb.v6i2.819>
- Hefniy, H., Dinihari, A. N., Rozi, F., Aini, N., & Tunnaja, A. (2022). Management of Parenting Activities in Forming Character of Early Childhood. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(4), 3169–3179. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2065>
- Heryanto, H. (2013). Pengaruh Kompetensi Guru Dan Kinerja Komite Sekolah Terhadap Prestasi Sekolah Pada Sma Di Kota Banjar. *Administrasi Pendidikan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana*, 1(1), 31–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/adpen.v1i1.157>
- Iskandar, M. Y., Bentri, A., Hendri, N., Engkizar, E., & Efendi, E. (2023). Integrasi Multimedia Interaktif Berbasis Android dalam Pembelajaran Agama Islam di Sekolah Dasar. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(4), 4575–4584. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i4.5021>
- Masduqi, A. (2021). *Pengelolaan Program Unggulan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Pesantren*. *Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.47498/tadib.v13i01.501>
- Maujud, F. (2018). Implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan islam (studi kasus pengelolaan Madrasah Ibtidaiyah Islahul Muta'allim Pagutan). *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14(1), 31–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/jpk.v14i1.490>
- Megiati, Y. E. (2016). Pemberdayaan Komite Sekolah: Kajian Konsep dan Implementasinya. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 1(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/sap.v1i2.1019>
- Muljawan, A. (2020). Model dan Strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Tabdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 9–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/tahdzibi.5.1.9-18>
- Munthe, N., Amini, A., & Elfrianto, E. (2021). Perencanaan Strategik Program Studi Agroteknologi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yashafa Kabupaten Aceh Singkil. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 7(1), 376546. <https://doi.org/10.30596/edutech.v7i1.6660>
- Nindatu, P. I. (2019). Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat

- Untuk Pengentasan Kemiskinan. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 3(2), 91–103. <https://doi.org/10.24853/pk.3.2.91-103>
- Rahmiati, R., Putri, M., Engkizar, E., & Mokhtar, M. M. (2023). The effectiveness of flipbook-based e-modules in increasing student creativity in nail art subject in higher education. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 13(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jpv.v13i2.54330>
- Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. *Syntax*, 4. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v1i4.38>
- Ridwan, M., Engkizar, E., Alkhairi, A. A., & Putri, G. S. (2023). Peran Organisasi Remaja Masjid Dalam Membentuk Generasi Muda. *Mapendis: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 1–12.
- Sabri, A. (2012). Pengelolaan Waktu Dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam. *Al-Ta Lim Journal*, 19(3), 180–187. <https://doi.org/10.15548/jt.v19i3.31>
- Sholeh, A. (2016). Pemberdayaan Pendidikan Dasar. *Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 1(2). <https://doi.org/10.18860/jt.v1i2.1846>
- Sholeh, M. (2009). Keefektifan Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 1(1), 41–54. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v1n1.p41-54>
- Soetari, E. (2017). Pendidikan Karakter dengan Pendidikan Anak untuk Membina Akhlak Islami. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 8(1), 116–147. <https://doi.org/10.52434/jp.v8i1.73>
- Tampubolon, M. P. (2020). *Change Management: Manajemen Perubahan: Individu, Tim Kerja, Organisasi*. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i1.8182>
- Wahyudi, I. (2015). Komersialisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 49-70. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/tawazun.v8i1.1132>
- Yakin, N. (2016). Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 93–105. <https://doi.org/10.58518/Madinah.V3I2.178>
- Yulianti, H., Iwan, C. D., & Millah, S. (2018). Penerapan Metode Giving Question And Getting Answer Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, [SL, 6(2), 197–216. <https://doi.org/10.36667/jppi.v6i2.297>

**Copyright holder :**

© Fitri, R., Ertati, E., Yetni, S., Riantito, S.

**First publication right:**

LP2M STAI Balaiselasa YPPTI Pesisir Selatan Sumatera Barat

**This article is licensed under:****CC-BY-SA**